



# RENCANA STRATEGIS

## 2010-2014

# DIKTI

*(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)*

- 156 Milia RTN - 1
- 8 Milia - E
- 2 Milia - S
- 1 Milia - P (Ruang SateLite)



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# DAFTAR ISI

---

i

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>Latar Belakang – Analisa Situasi</b> .....	1
<b>Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</b> .....	3
<b>Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</b> .....	3
<b>Tujuan Stratejik</b> .....	3
<b>Kebijakan</b> .....	3
a. Kebijakan untuk mencapai tujuan-1: Terbangunnya sistem Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .....	3
b. Kebijakan untuk mencapai tujuan-2: Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan.....	4
c. Kebijakan untuk mencapai tujuan-3: Keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi.....	8
d. Kebijakan untuk mencapai tujuan-4: Mewujudkan perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel.....	10
e. Kebijakan untuk mencapai tujuan-5: Interaksi perguruan tinggi dan masyarakat .....	11
<b>LAMPIRAN 1 : INDIKATOR KINERJA MENURUT TUJUAN STRATEGIS</b> .....	13
<b>LAMPIRAN 2 : ARAH KEBIJAKAN</b> .....	19
<b>LAMPIRAN 3 : TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KEGIATAN</b> .....	27

# Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014

## Latar Belakang – Analisa Situasi

---

### Modal dasar Pancasila

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan semakin bergesernya perekonomian dunia pada ekonomi berbasis pengetahuan, maka pendidikan tinggi semakin dibutuhkan oleh masyarakat luas maupun negara. Pendidikan tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus tumbuh dengan cukup signifikan. Kemajuan pembangunan membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi terus meningkat. Pada tahun 2001 jumlah mahasiswa sekitar 3,4 juta orang, pada akhir tahun 2009 jumlah mahasiswa di Indonesia telah lebih dari 4,5 juta orang. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia (18%) masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Sementara kualitas dan relevansi pendidikan tinggi masih menjadi salah satu kelemahan kita. Rendahnya jumlah publikasi ilmiah secara internasional, jumlah paten dan kekayaan intelektual lainnya, serta tingginya angka sarjana yang menganggur merupakan sebagian indikasi rendahnya kualitas dan relevansi.

Di sisi lain, perguruan tinggi dipandang sebagai salah satu sumber inovasi dan solusi bagi kemajuan bangsa baik melalui temuan di bidang industri, pertanian, kesehatan, infrastruktur, maupun sosial-ekonomi secara luas. Pada saat yang sama, globalisasi mendorong setiap negara untuk semakin kompetitif dalam merebut pasar dunia dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Kesejahteraan masyarakat tak lagi ditentukan oleh kekayaan sumberdaya alam maupun ketersediaan tenaga kerja, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas manusia, oleh daya saing dan produktivitas warga masyarakatnya. Daya saing bangsa semakin ditentukan oleh tata pemerintahan yang baik (*good government* dan *good governance*) yang bisa memberi kerangka pembangunan yang sehat, kualitas sumberdaya manusia, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan inovasinya. Modal insani menjadi kunci utama kemajuan bangsa. Oleh karenanya peran pendidikan tinggi menjadi sangat sentral dalam membangun daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan serta tekanan pertumbuhan penduduk dunia menimbulkan berbagai potensi krisis air, energi, dan pangan, serta perubahan cuaca dalam skala global. Bencana alam yang intensitasnya terus meningkat merupakan ancaman yang harus dikelola dan diantisipasi dengan baik dan bijak. Pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon merupakan ancaman yang hanya bisa diatasi secara bersama-sama antar negara. Perguruan tinggi di Indonesia, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi isu-isu lingkungan serta mendorong pembangunan yang

berkelanjutan melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*).

Perkembangan demokrasi dalam sepuluh tahun terakhir telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ke tiga di dunia. Desentralisasi dan otonomisasi telah pula merubah peta sosial-politik di Indonesia, dari pola sentralistik ke arah lebih partisipatoris dan mendaerah. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi diharapkan memegang peran sebagai pemersatu bangsa sekaligus mengawal demokratisasi melalui pencerdasan dan pembelajaran kepada masyarakat luas. Perguruan tinggi juga diharapkan menjadi contoh bagi terbentuknya tata-kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel. Demokratisasi dan globalisasi membawa eksese perubahan tata nilai dan karakter anak bangsa. Nilai-nilai luhur luntur oleh nilai-nilai asing yang masih superfisial karena belum berakulturasi dan beradaptasi dengan baik. Dalam kondisi tersebut, maka karakter bangsa menjadi isu yang mencemaskan masyarakat. Pendidikan tidak saja diharapkan menghasilkan insan yang cerdas dan terampil (cerdas komprehensif), tetapi juga mampu membangun insan Indonesia yang berkarakter; menjadi warga negara yang produktif, inklusif dan menghargai keragaman budaya, sekaligus menjadi warga dunia yang menghargai nilai-nilai universal.

Dalam konteks tersebut maka pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas, dan terampil; memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik melalui adaptasi kemajuan ipteks untuk kemakmuran bangsa, maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Pada saat yang sama perguruan tinggi juga diharapkan menjadi suluh bagi demokratisasi dan perkembangan sosial masyarakat serta pemersatu bangsa. Agar perguruan tinggi bisa menjalankan perannya secara optimal merespons perubahan dengan cepat dan menggunakan sumberdayanya secara efisien dan efektif, maka otonomi perguruan tinggi merupakan salah satu prasyarat yang utama. Otonomi perguruan tinggi yang sehat harus disertai dengan akuntabilitas yang baik. Dengan dibatalkannya UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Majelis Konstitusi maka hilang pula landasan hukum bagi pembentukan perguruan tinggi negeri sebagai entitas legal yang otonom. Oleh karena itu diperlukan kerangka baru untuk mewadahi otonomi perguruan tinggi yang akuntabel dan bisa diterima masyarakat. Dalam 5 tahun ke depan akan terjadi transformasi besar peta pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan tersebut memerlukan reposisi dan transformasi pemerintah dari pengatur, pengendali seluruh sistem pendidikan tinggi menuju peran yang lebih memfasilitasi kemajuan dan pencapaian visi dan misi pendidikan tinggi tanpa meninggalkan mandatnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa.

# Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

---

Sistem pendidikan tinggi yang **sehat** dan **bermutu**, menghasilkan insan **beriman**, **bertaqwa**, **cerdas**, dan **terampil**.

## Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

---

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, mengemban misi:

- a. Menetapkan, memantau, dan mengendalikan sistem pendidikan tinggi secara nasional;
- b. Menyelaraskan sistem pendidikan tinggi dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
- c. Memfasilitasi, menguatkan, dan memberdayakan perguruan tinggi yang bermutu, efisien, transparan dan akuntabel;
- d. Menjaga terlayannya kepentingan masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan tinggi.

## Tujuan Stratejik

---

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. **Terbangunnya sistem Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien**
- b. **Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan** dengan kebutuhan pembangunan nasional sehingga berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa;
- c. **Keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses** untuk memperoleh pendidikan tinggi;
- d. **Perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel** sejalan dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. **Interaksi perguruan tinggi dengan masyarakat** yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

## Kebijakan

---

### a. Kebijakan untuk mencapai tujuan-1: Terbangunnya sistem Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

1. *Mereposisi dan mereformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*

Dalam upaya Ditjen Dikti untuk bisa mengemban misi dan perannya untuk mencapai tujuan pengembangan sistem pendidikan tinggi seperti diuraikan di atas, maka peran dan fungsi Ditjen Dikti maka perlu dilakukan reformasi secara sistematis dan terprogram terhadap struktur dan fungsi Ditjen Dikti sebagai pengelola sektor pendidikan tinggi di tingkat nasional. Struktur dan fungsi yang ada saat ini perlu diselaraskan dengan misi Ditjen Dikti yang lebih diposisikan sebagai fasilitator, penguat dan pemberdaya bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Fungsi regulator harus lebih ditekankan pada perlindungan bagi masyarakat dan kepentingan bangsa melalui tindakan korektif dalam batas dan kewenangan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.

**2. *Menyiapkan dan menyempurnakan landasan hukum pengembangan sektor pendidikan tinggi yang kondusif***

Untuk memastikan ketertercapaian dan keberlangsungan sistem yang diinginkan, perlu disusun landasan hukum yang kondusif dalam bentuk undang-undang untuk melaksanakan Pasal 53(4) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan operasionalisasinya, termasuk penyelarasan peraturan-peraturan yang ada baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan tinggi.

**b. Kebijakan untuk mencapai tujuan-2: Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan**

Agar akses untuk mendapat pendidikan tinggi yang berkualitas semakin tersedia, maka diperlukan strategi ekspansi yang tepat. Dengan keterbatasan sumberdaya, maka diperlukan ekspansi yang strategis dan optimal, untuk itu dirancang 4 strategi kebijakan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi internal perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dengan meningkatnya efisiensi internal yang berarti terjadi pengurangan waktu studi, maka kapasitas perguruan tinggi dalam menampung lulusan SMA/K akan meningkat dengan investasi yang minimal.
- b. Mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendidikan tersebut bisa diselenggarakan di SMK melalui *seamless education*, community college/akademi, politeknik, maupun institusi pendidikan tinggi lainnya. Program ini harus betul-betul digandengkan dengan DUDI dan kerjasama pendanaan dari daerah.
- c. Mengembangkan moda pembelajaran pendidikan tinggi non konvensional. Melalui kolaborasi antara Universitas Terbuka yang memiliki keunggulan dalam *program delivery* dengan perguruan tinggi konvensional yang memiliki keunggulan dalam materi dan sumberdaya diharapkan pembelajaran non konvensional berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi dapat menjangkau seluruh penjuru nusantara dengan pembelajaran berkualitas. Untuk itu diperlukan penguatan dan perluasan INHERENT sebagai tulang punggung jejaring pendidikan tinggi dan riset nasional.



- d. Mengembangkan alternatif pendanaan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Selain beasiswa, alternatif pendanaan seperti voucher dan kredit mahasiswa perlu dikembangkan tidak hanya untuk mahasiswa PTN tetapi juga untuk mahasiswa PTS, karena pada kenyataannya banyak mahasiswa kurang mampu tidak mampu bersaing masuk ke PTN.

**1. Melakukan diversifikasi mandat dan misi perguruan tinggi**

Diversifikasi mandat diperlukan untuk memenuhi keragaman kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Kebutuhan pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah di mana suatu institusi pendidikan tinggi berdomisili juga perlu dijadikan sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan mandat dan misi suatu perguruan tinggi. Ditjen Dikti mendorong dan mempromosikan kesetaraan apresiasi masyarakat pada pendidikan jalur akademik dan vokasi.

**2. Mendorong perguruan tinggi mencapai posisi dan peran terbaiknya**

Perkembangan perguruan tinggi dilandasi oleh tujuan, fungsi dan lingkungan yang berbeda-beda. Institusi pendidikan tinggi di Indonesia perlu didorong pengembangannya dengan memperhatikan keragaman dimaksud sehingga setiap institusi mengarah pada pencapaian keunggulan yang mencerminkan keunikan masing-masing. Ditjen Dikti memfasilitasi dan memberikan insentif kepada perguruan tinggi sesuai dengan kekhasan dan tingkat kemajuan, potensi dan niche yang miliki masing-masing perguruan tinggi. Sebagian perguruan tinggi didorong sebagai universitas riset yang secara bertahap dipromosikan sebagai pembawa kepentingan bangsa di ajang internasional, sementara kelompok perguruan tinggi yang lain didorong pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

**3. Mengembangkan sumber daya dan memfasilitasi program akademik perguruan tinggi**

Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi, sumber daya dan program akademik di perguruan tinggi perlu difasilitasi pengembangannya, khususnya dalam rangka meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Perluasan akses (ekspansi) perlu diikuti oleh penambahan sumber daya dan program yang dilandasi oleh kebutuhan nyata baik dari sisi perguruan tinggi sebagai penyedia layanan (*supply side*) maupun dari sisi masyarakat pengguna layanan (*demand side*). Penyediaan dan penambahan sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya sarana-prasarana, sumberdaya keuangan, sumberdaya informasi, sumberdaya manajemen.

**4. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat**

Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat yang antara lain dicirikan dari berfungsinya unsur-unsur organisasi dan tata kelola yang sehat berbasis nilai-nilai akademik, etik, dan meritokratik. Terbangunnya suasana akademik yang melandasi tata hubungan antar sivitas akademika maupun antara sivitas akademika dan *stake holders*.

**5. Meningkatkan keselarasan hasil perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat**

Relevansi dalam hal ini dapat diartikan sebagai tingkat sensitivitas sistem pendidikan tinggi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Ditjen Dikti perlu memfasilitasi dan mendorong perguruan tinggi untuk senantiasa meningkatkan relevansi program dan hasil luarannya terhadap kebutuhan pembangunan bangsa baik kebutuhan saat ini maupun di masa yang akan datang. Fasilitasi dimaksud meliputi penyiapan sumber daya, koordinasi dan pengembangan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak industri, di dalam maupun luar negeri. Agar terwujud kegayutan hasil pendidikan tinggi, maka Ditjen Dikti berupaya menyelaraskan antara perguruan tinggi dengan dunia profesi melalui penguatan organisasi profesi serta membangun sistem informasi pasar kerja.

**6. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter**

Proses pendidikan direncanakan senantiasa untuk memenuhi kompetensi secara menyeluruh dan seimbang, ilmu, keterampilan dan *soft skills*. Unsur-unsur *soft skills* sangat menentukan pencapaian dan fungsionalisasi dari ranah kognitif dan psikomotorik. Untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil dan berkarakter diperlukan upaya menyeluruh (*holistic*) dari berbagai pihak dan melibatkan seluruh jenjang pendidikan. Ditjen Dikti memberikan arah dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya atribut lulusan dimaksud. Inovasi dimaksud meliputi baik dalam kaitan dengan muatan kurikulum maupun di luar kurikulum yang secara keseluruhan menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk terbentuknya lulusan yang unggul dan kompetitif.

**7. Meningkatkan Kewirausahaan Lulusan**

Lulusan perguruan tinggi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase sarjana yang menganggur harus diatasi antara lain dengan meningkatkan kemampuan lulusan perguruan tinggi untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan kreativitas, daya juang, dan kewirausahaan.

**8. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset.**

Menyadari pentingnya peran riset di perguruan tinggi, Ditjen Dikti perlu mendorong terbangunnya sistem inovasi nasional dan daerah yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan daerah, nasional maupun global. Sesuai dengan kapasitasnya dan dilandasi oleh kepentingan nasional, Ditjen Dikti mengembangkan pusat-pusat unggulan nasional dengan memanfaatkan kepakaran yang ada di berbagai perguruan tinggi. Pusat unggulan dimaksud diarahkan pada fokus tertentu, baik berbasis (sub) sektor, komoditas, maupun issue strategis nasional, dan melibatkan berbagai disiplin keilmuan agar kajian tuntas dari hulu hingga hilir. Strategi pengembangan pusat unggulan berbasis riset disertai dengan pengembangan sistem terpadu yang dapat menumbuhkan hubungan akademik dan hubungan industrial. Upaya-upaya yang dilakukan tidak saja menjadikan hasil pusat unggulan mendukung program nasional/daerah, namun Ditjen Dikti juga secara aktif memfasilitasi proses peningkatan daya guna dari hasil riset yang strategis, untuk memperkuat daya saing nasional/daerah.



**9. Mengawal implementasi program strategis nasional secara berkelanjutan**

Pengembangan sektor pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari program strategis nasional yang membutuhkan dukungan sumber daya terdidik dan trampil yang utamanya tersedia di perguruan tinggi. Ditjen Dikti mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk berada di garis depan dalam melaksanakan program strategis nasional. Dalam hal riset, Ditjen Dikti berperan sebagai penyelaras dengan agenda dewan riset nasional, lembaga riset departemen dan non departemen, lembaga riset daerah, maupun riset di dunia industri.

**10. Meningkatkan relevansi riset perguruan tinggi**

Agar riset di perguruan tinggi semakin relevan dan berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan bangsa, dunia usaha dan industri, perlu dikembangkan agenda riset yang didasarkan pada isu strategis dengan kajian lintas disiplin ilmu. Isu strategis tersebut, selain mengacu pada program nasional riset strategis, hendaknya dijabarkan oleh klaster pakar multi disiplin ilmu ke dalam tema-tema penelitian yang kemudian ditawarkan untuk diteliti oleh para peneliti di perguruan tinggi.

**11. Mendorong dan memfasilitasi internasionalisasi pendidikan tinggi**

Sejalan dengan arus globalisasi, pendidikan tinggi di Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan global. Ditjen Dikti bekerjasama dengan kementerian lain yang berwenang menyiapkan peraturan perundangan yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya internasionalisasi pendidikan tinggi Indonesia termasuk dalam hal, namun tidak terbatas pada, mobilitas mahasiswa dan dosen asing, pengakuan dan penyetaraan gelar dan program studi, dll.

Ditjen Dikti mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sebagai perguruan tinggi berkelas dunia (*world class university*). Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, Ditjen Dikti menetapkan beberapa perguruan tinggi yang dipandang paling mampu untuk dijadikan sebagai perguruan tinggi unggulan (*apex universities*) yang diberikan mandat dan tanggungjawab serta difasilitasi khusus sebagai perguruan tinggi berkelas dunia.

**12. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Ditjen Dikti mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui sistem akreditasi dikembangkan dengan dukungan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang baik dan terintegrasi. PDPT diharapkan menjadi pangkalan informasi untuk keperluan manajemen di tingkat pusat maupun di tingkat perguruan tinggi serta menjadi rujukan informasi bagi masyarakat.

Standar nasional pendidikan tinggi yang dikembangkan selaras dengan kualifikasi nasional (KKNI) menjadi acuan dalam pengembangan layanan pendidikan tinggi dan secara periodik diakreditasi melalui sistem akreditasi nasional yang terpercaya dan profesional. Untuk menjamin kegayutan antara peningkatan kualitas dan relevansi,

maka peran organisasi profesi dalam pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal dan peningkatan relevansi pendidikan tinggi harus terus ditingkatkan.

**13. Perguruan Tinggi Asing untuk perluasan akses dan peningkatan kualitas**

Masuknya PTA akan mempengaruhi pendidikan tinggi di dalam negeri. PTA dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, serta mengurangi devisa yang keluar dari Indonesia. Masuknya PTA akan meningkatkan persaingan di dalam negeri dan dapat mengarah pada komersialisasi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembukaan PTA harus diarahkan pada peningkatan akses yang berkualitas dan diharuskan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. (lihat PP 17/2010).

**c. Kebijakan untuk mencapai tujuan-3: Keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi**

**1. Meningkatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan**

Untuk mewujudkan pencapaian pemerataan pendidikan, maka bersama-sama masyarakat Dikti berupaya mengurangi kesenjangan akses pendidikan tinggi pada anak-anak usia pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan melalui penambahan secara terus menerus jumlah penerima beasiswa serta jenis ketersediaan beasiswa, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; serta pengembangan sistem dan prosedur penyeleksian calon penerima beasiswa agar efektif dan efisien. Penyediaan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu hendaknya dikembangkan sejak dari tingkat sekolah menengah, karena saringan terbesar justru terjadi pada lulusan SMP yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena biaya.

Bentuk bantuan pembiayaan yang berupa beasiswa, voucher, maupun kredit bagi mahasiswa dikembangkan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan industri. Sistem pengelolaan bantuan biaya pendidikan tersebut harus pula dikembangkan dengan baik agar efektif dan efisien. Belajar dari pengalaman tingginya *default rate* pada KMI dan belum tersedianya sistem penelusuran lulusan, maka sistem pemberian kredit bagi mahasiswa dilakukan dengan mengandalkan pada ikatan sosial dan emosional seperti melalui ikatan alumni. Dikembangkan juga sistem insentif yang baik bagi perguruan tinggi yang berhasil menyelenggarakannya.

**2. Mendayagunakan berbagai sumber daya untuk meningkatkan cakupan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan**

Dikti mensinergikan dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Selain dari itu Dikti juga senantiasa berupaya meningkatkan partisipasi para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk bersama-sama mengembangkan skim beasiswa dengan memberikan sistem insentif yang tepat. Di antaranya adalah dengan mendorong partisipasi dari kelembagaan sosial dan filantropis, berupaya mengembangkan sistem yang menyebabkan ketersediaan dari beasiswa semakin terjamin tidak saja untuk pendidikan tinggi berkualitas, namun juga untuk pendidikan yang misi pemerataannya dianggap cukup penting di daerah.

**3. *Memperbaiki ekuitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili***

Mengingat beragamnya kondisi geografis maupun budaya dan tingkat kemajuan sosial ekonomi masyarakat, maka daerah-daerah yang dianggap masih tertinggal akan diprioritaskan untuk menerima skema beasiswa dan bantuan kuliah. Ini diupayakan oleh Dikti melalui pengembangan sistem beasiswa khusus daerah yang kurang terwakili, diantaranya adalah daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah yang lokasinya jauh dari fasilitas pendidikan tinggi. Selain dari itu upaya untuk mencapai pemerataan juga dilakukan dengan pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

**4. *Optimasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah***

Untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui optimasi kapasitas dan efisiensi internal. Melalui peningkatan efisiensi tersebut maka daya tampung PTN akan meningkat. Optimasi kapasitas juga dilakukan melalui pengembangan sumberdaya dan pemanfaatan fasilitas secara efisien.

**5. *Optimasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat***

Saat ini jumlah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sangat banyak, sehingga efisiensinya rendah karena rerata jumlah mahasiswa yang kecil. Dikti mendorong optimasi dari segi jumlah maupun ukuran perguruan tinggi swasta tersebut, di antaranya dengan memfasilitasi dan mendorong penggabungan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang kecil, *right sizing*, dan rasionalisasi jumlah perguruan tinggi agar lebih gayut dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Dikti akan terus mengoptimalkan dan memobilisasi partisipasi dan sumberdaya dari masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan akses ke pendidikan tinggi yang bermutu.

**6. *Meningkatkan daya tampung dan mahasiswa pendidikan vokasi***

Lulusan SMK yang akan meningkatkan kompetensinya harus difasilitasi melalui sistem penerimaan mahasiswa baru jalur vokasi yang berbeda dengan jalur akademik. Karena lulusan SMK telah mendapatkan dasar-dasar ketrampilan vokasi, maka masa studi di program diploma dapat dikurangi sehingga akan meningkatkan daya tampung pendidikan vokasi. Peningkatan daya tampung pendidikan vokasi harus dilakukan dengan tidak mengurangi tujuan pengembangan SMK. Pengembangan akademi yang menyelenggarakan pendidikan D1, D2, D3, hingga D4 harus didorong namun harus melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri agar lulusan terserap ke lapangan kerja dengan baik. Karena serapan dunia kerja untuk lulusan pendidikan vokasi tidak serta-merta tersedia, maka mahasiswa harus juga dilengkapi dengan kemampuan untuk berwirausaha agar mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Untuk meminimalkan kebutuhan investasi baru, maka perlu ditingkatkan pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang ada di SMK, balai latihan kerja, dsb. melalui kerjasama antar lembaga.

**7. Meningkatkan peran masyarakat terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan kesetaraan**

Potensi masyarakat, terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan kesetaraan sangat besar. Dikti memfasilitasi dan mendorong partisipasi dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses baik melalui beasiswa bagi masyarakat di daerah maupun melalui pendirian atau perluasan daya tampung perguruan tinggi yang lulusannya dijamin bisa diserap oleh dunia usaha yang bersangkutan atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan arah pengembangan daerah.

**8. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi**

Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) serta jejaring riset dan pendidikan tinggi seperti INHERENT dan GDLN perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan kesetaraan akses pada pendidikan tinggi yang berkualitas. Pemanfaatan TIK untuk riset dan pembelajaran jarak jauh didorong untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya baik dosen maupun sarana-prasarana pendidikan seperti perpustakaan digital yang terintegrasi, e-laboratory, e-learning, dsb. TIK juga dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pengelolaan perguruan tinggi.

**d. Kebijakan untuk mencapai tujuan-4: Mewujudkan perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel**

**1. Mendorong pembangunan sistem kelembagaan mandiri**

Dengan bergesernya peran Ditjen Dikti sebagai aktor sentral pengembangan sektor, maka peran pemangku kepentingan perlu ditingkatkan melalui ditumbuhkannya sistem kelembagaan yang melibatkan badan mandiri baik bentuk pemerintah maupun masyarakat. Peran badan seperti BAN-PT, BSNP, DPT, dan organisasi profesi, perlu diposisikan sebagai mitra sinergis yang mendorong pengembangan sektor pendidikan tinggi secara keseluruhan. Untuk memperkuat kebijakan dikti dalam merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan bidang ilmu, diperlukan komisi bidang ilmu yang beranggotakan para akademisi dari masing-masing disiplin. Perlu penguatan lembaga perwakilan *stake holders* seperti DPT sebagai *think-tank* untuk memberi asupan bagi pengembangan kebijakan Dikti.

Karena akreditasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang penting, maka sistem akreditasi (termasuk kelembagaannya) yang kredibel dan akuntabel harus terus dikembangkan, termasuk kapasitasnya untuk mengakreditasi program studi yang jumlahnya sangat banyak. Sebelum adanya lembaga mandiri, pemerintah harus berperan aktif dalam membentuk lembaga tersebut, mengembangkan kapasitasnya hingga pada saatnya menjadi lembaga yang betul-betul mandiri. Peran, fungsi dan kewenangan lembaga mandiri tersebut harus diselaraskan antara satu dan lainnya sehingga terbentuk sistem yang sehat, efisien, dan efektif dalam mencapai kualitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

**2. Menyiapkan kerangka legal PT menjadi lembaga otonom dan akuntabel**

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas dan dengan dibatalkannya UU No 09/2009, perguruan tinggi akan dikembangkan sistem tatakelolanya sebagai suatu lembaga yang otonom dan akuntabel. Satu lembaga yang otonom dan akuntabel. Namun untuk itu diperlukan kerangka perundangan yang tepat. Untuk itu Ditjen Dikti akan menyiapkan kerangka hukum yang tepat untuk memberi landasan bagi transformasi PTN menjadi lembaga yang otonom dan akuntabel. Sementara itu peta jalan yang serupa tapi tak sama perlu dikembangkan pula untuk PTS. Dengan mengambil pengalaman dari UU BHP maka pelibatan stake holders secara intensif sangat diperlukan. Ditjen Dikti membantu pengembangan kapasitas tata kelola PTN dan PTS agar kemandirian (otonomi) dan akuntabilitas yang sehat dapat terbangun. Ditjen Dikti mendorong terciptanya iklim akademik yang sehat dalam semangat otonomi yang didasari pada profesionalisme akademik, yang antisipatif dan responsif terhadap perubahan, berorientasi mutu dan relevansi, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

**3. *Menguatkan dan menyehatkan perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel***

Tata kelola perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel yang mengedepankan prinsip-prinsip *good university governance* harus terus dikembangkan. Menyadari signifikansi perubahan yang akan terjadi dan mengingat disparitas tingkat perkembangan institusi pendidikan tinggi yang ada, maka Ditjen Dikti perlu meningkatkan kapasitas perguruan tinggi yang ada dalam pengelolaan institusi sebagai badan hukum pendidikan serta membangun sistem pendidikan tinggi yang sehat (*enabling environment*). Perubahan tata kelola yang diharapkan adalah adanya kemandirian yang dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi secara berkelanjutan.

**4. *Membangun mutu dan kapasitas perguruan tinggi melalui pembinaan dan kemitraan***

Melihat keragaman kematangan dan perkembangan institusi pendidikan tinggi yang ada, kerjasama antar perguruan tinggi di dalam negeri, baik antara sesama perguruan tinggi negeri maupun antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam bentuk pembinaan maupun kemitraan sejajar perlu didorong. Melalui pembinaan tersebut diharapkan akan terbangun kapasitas perguruan tinggi yang masih lemah. Sedangkan melalui kemitraan, kemajuan bersama akan terjadi melalui jejaring nasional perguruan tinggi yang semakin kuat untuk menghadapi persaingan global.

**e. Kebijakan untuk mencapai tujuan-5: Interaksi perguruan tinggi dan masyarakat**

**1. *Memberdayakan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi***

Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari masyarakat. Kemajuan pendidikan tinggi merupakan cerminan kemajuan masyarakat dan sebaliknya. Kontribusi dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan tinggi baik secara langsung/tangible maupun tidak langsung/intangible harus terus didorong. Ditjen

Dikti mendorong agar masyarakat semakin sadar akan fungsinya dalam mengembangkan dan menjaga eksistensi pendidikan tinggi yang berkualitas. Ditjen Dikti juga mendorong agar partisipasi masyarakat pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi semakin besar, melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran aktif lembaga-lembaga laba dan nir laba yang dapat dirasakan manfaatnya oleh pendidikan tinggi. Dikti juga mendorong fungsi akuntabilitas pendidikan tinggi melalui peran kontrol masyarakat.

## **2. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat dan pencapaian MDGs**

Peran perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat di sekelilingnya sangat besar. Diharapkan PT dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat, kampus menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang sehat, menjadi contoh dalam tata-kelola yang sehat dan akuntabel, dan menjadi suluh bagi masyarakat. Dikti mendorong dan memfasilitasi aktualisasi peran perguruan tinggi tersebut baik melalui pendanaan maupun melalui program yang relevan. Komitmen pembangunan milenium (MDGs) menyisakan masa kerja sekitar 5 tahun dari sekarang. Komponen-komponen yang menjadi target pencapaian pembangunan milenium tidak dapat berdiri sendiri. Peran pendidikan tinggi dalam pencapaian MDGs sangat besar baik dengan menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan sasaran MDGs maupun melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diseminasi ipteks yang dapat memanfaatkan hasil temuan terkini terhadap berbagai persoalan utama pembangunan manusia. Agenda riset di perguruan tinggi, selain mengeksplorasi ranah-ranah baru keilmuan, juga harus relevan dengan upaya pencapaian MDGs dan pembangunan manusia dan kelestarian lingkungan melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.



# LAMPIRAN 1 : INDIKATOR KINERJA MENURUT TUJUAN STRATEGIS

## Tujuan 1: Terbangunnya Sistem Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang Efektif dan Efisien

Kebijakan	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Mereposisi dan mereformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  2. Menyiapkan dan menyempurnakan landasan hukum pengembangan sektor pendidikan tinggi yang kondusif	IKU4.3	Jumlah PT PK BLU/BLU (BHP)	IKK 4.1.1	Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan penganggaran
	IKU4.4	Jumlah PT beropini WTP dari KAP	IKK 4.1.2	Prosentase DIPA satker ditjen Dikti direvisi tingkat pusat
			IKK 4.1.3	Prosentase usulan BLU PTN dari Dikti ditetapkan kemenkeu kurang dari 6 bulan
			IKK 4.1.8	Prosentase temuan hasil audit BPK dapat diselesaikan kurang dari 6 bulan
			IKK 4.1.9	Prosentase persetujuan TUP satker sekretariat 100%
			IKK 4.1.10	Rerata hari kerja efektif pegawai
			IKK 4.1.12	Jumlah layanan di bagian menerapkan e-layanan
			IKK 4.1.14	Jumlah PT tergabung dalam inherent (GDLN)
			IKK 4.1.16	Jumlah informasi pendidikan tinggi yang sudah dipublikasikan
			IKK 4.1.17	Jumlah pameran pendidikan tinggi
			IKK 4.7.7	Persentase tenaga kependidikan PTN yang memiliki sertifikat fungsional
			IKK 4.8.1	Persentase PTN Menuju Otonomi PTP
			IKK 4.9.7	Jumlah PT yang mempunyai inkubator bisnis/industry

## Tujuan 2: Ketersediaan Pendidikan Tinggi Indonesia yang Bermutu dan Relevan

Kebijakan	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Melakukan diversifikasi mandat perguruan tinggi	IKU4.5	Jumlah prodi berakreditasi	IKK4.2.1	Jumlah satker penerima dana masyarakat
	IKU4.6	Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	IKK4.4.5	Jumlah pusat kewirausahaan dan produktivitas
			IKK4.4.7	Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran
2. Mengembangkan sumber daya yang berkualitas	IKU4.7	Jumlah perguruan tinggi masuk 500 dunia	IKK4.4.8	Waktu tunggu mendapatkan kesempatan berkarya pertama (bulan)
	IKU4.10	Persentase dosen berkualifikasi S-2	IKK4.5.1	Prodi vokasi yang terakreditasi minimal B
3. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter	IKU4.11	Persentase dosen berkualifikasi S-3	IKK4.6.1	Prodi profesi kesehatan yang terakreditasi
	IKU4.12	Persentase dosen bersertifikat	IKK4.6.2	Jumlah PT memenuhi standar mutu sarana dan prasarana
			IKK4.7.1	Persentase dosen PTN yang berkualifikasi S2
			IKK4.7.2	Persentase dosen PTS yang berkualifikasi S2
4. Meningkatkan keselarasan hasil perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.	IKU4.13	Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK4.7.3	Persentase dosen PTN yang berkualifikasi S3
	IKU4.14	Persentase dosen dengan publikasi internasional	IKK4.7.4	Persentase dosen PTS yang berkualifikasi S3
			IKK4.7.5	Persentase dosen PTN bersertifikat
5. Meningkatkan kewirausahaan lulusan.			IKK4.7.6	Persentase dosen PTS bersertifikat
			IKK4.7.8	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan akademik di luar negeri
6. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset.			IKK4.7.9	Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan akademik di dalam negeri
			IKK4.7.10	Jumlah PT penyelenggara sertifikasi dosen
7. Mengawal implementasi program strategis nasional secara berkelanjutan			IKK4.8.3	Jumlah penutupan PTS
			IKK4.8.5	Jumlah mahasiswa asing di PTI
8. Mendorong dan memfasilitasi internasionalisasi pendidikan tinggi			IKK4.8.6	Jumlah kerjasama kelembagaan
			IKK4.8.7	Jumlah kantor urusan internasional di perguruan tinggi
			IKK4.9.1	Presentase dosen melakukan penelitian
			IKK4.9.2	Jumlah dosen dengan publikasi nasional
9. Memperkuat sistem penjaminan mutu perguruan tinggi			IKK4.9.3	Jumlah dosen dengan publikasi internasional
			IKK4.9.5	Persentase PT yang memberikan akses internet dan e-journal
			IKK4.9.7	Jumlah PT yang mempunyai inkubator bisnis/industri
			IKK4.9.8	Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan industri

Kebijakan	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan
			<p data-bbox="1402 209 1872 236">berbasis penelitian dan pengembangan</p> <p data-bbox="1402 240 2114 341">IKK4.9.9 Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan</p> <p data-bbox="1402 346 2018 414">IKK4.9.10 Persentase mahasiswa yang melaksanakan program kreatifitas mahasiswa</p> <p data-bbox="1402 419 2051 446">IKK4.9.11 Jumlah dosen yang menulis buku ajar perguruan tinggi</p>

### Tujuan 3: Keterjangkauan, Kesenjangan, dan Keterjaminan Akses Untuk Memperoleh Pendidikan Tinggi

Kebijakan	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Meningkatkan aksesibilitas calon mahasiswa dan mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau mahasiswa dalam bidang ilmu yang strategis	IKU4.1	APK PT dan PTA usia 19-23 Thn	IKK4.4.1	Persentase mahasiswa PTN penerima beasiswa pemerintah
	IKU4.2	Rasio kesetaraan gender PT	IKK4.4.2	Persentase mahasiswa PTS penerima beasiswa pemerintah
	IKU4.8	Rasio mhs vokasi : total mhs vokasi dan S-1	IKK4.4.3	Persentase mahasiswa menerima beasiswa dunia usaha dan donor lainnya (CSR)
	IKU4.9	APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)	IKK4.4.4	Jumlah mahasiswa peraih medali dalam olimpiade sains yang menerima beasiswa
2. Mendayagunakan berbagai sumber daya untuk meningkatkan cakupan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	IKU4.16	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	IKK4.4.6	Pertambahan jumlah mahasiswa baru hasil perubahan model pembelajaran
3. Memperbaiki ekuitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili			IKK4.8.2	Jumlah pendirian/perubahan PTN dan PTS baru
			IKK4.8.4	Jumlah pembukaan prodi baru
4. Optimasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat				
5. Meningkatkan peran masyarakat terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan kesetaraan				
6. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan jarak jauh terkait dengan perluasan akses yang berkualitas, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan pendidikan berkelanjutan.				

## Tujuan 4: Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Otonom dan Akuntabel

Kebijakan	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Mereposisi dan mentransformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  2. Mendorong pembangunan sistem kelembagaan perguruan tinggi yang mandiri  3. Memperkuat dan menyetatkan perguruan tinggi badan hukum pendidikan  4. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	IKU4.3	Jumlah PT PK BLU/BLU (BHP)	IKK 4.1.4	Persentase anggaran di blokir pada DIPA tahun berjalan
	IKU4.4	Jumlah PT beropini WTP dari KAP	IKK 4.1.5	Persentase satker laporan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu
	IKK 4.1.6	Prosentase laporan akuntansi manual satker sesuai SAI		
	IKK 4.1.7	Jumlah satker BLU menerapkan laporan keuangan sesuai SAK dan SAP		
	IKK 4.1.8	Prosentase temuan hasil audit BPK dapat diselesaikan kurang dari 6 bulan		
	IKK 4.1.11	Jumlah laporan BMN satker sesuai SIMAK BMN		
	IKK 4.1.13	Persentase satker menerapkan e-pengadaan > 50% paket PBJ		
	IKK 4.1.14	Jumlah PT tergabung dalam inherent (GDLN)		
	IKK 4.1.15	Persentase satker berdaya-serap > 95%		
	IKK 4.7.7	Persentase tenaga kependidikan PTN yang memiliki sertifikat fungsional		
	IKK 4.8.1	Persentase PTP Menuju Otonomi PTP		
	IKK 4.9.7	Jumlah PT yang mempunyai inkubator bisnis/industry		

**Tujuan 5: Interaksi Perguruan Tinggi Dengan Masyarakat yang Mencerminkan Hubungan Timbal Balik yang Selaras dan Saling Menguntungkan**

Kebijakan	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Memberdayakan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi 2. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat dan pencapaian MDGs	IKU4.15	Jumlah HKI yang dihasilkan	IKK4.9.4 IKK4.9.6	Jumlah HKI yang dihasilkan Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat



## LAMPIRAN 2 : ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan	Program
1. Mereposisi dan mereformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi organisasi dan tata kelola di lingkungan Dikti</li> <li>2. Reformasi organisasi dan tata kelola kantor daerah/regional</li> <li>3. Business process reengineering termasuk hubungan dengan PTS</li> <li>4. Penguatan lembaga semi pemerintah</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan</li> <li>6. Pengembangan kapasitas SDM Dikti</li> <li>7. Penguatan kapasitas dikti untuk berkoordinasi lintas kementerian</li> <li>8. Penguatan kapasitas perencanaan</li> </ol>
2. Menyiapkan dan menyempurnakan landasan hukum pengembangan fungsi pendidikan tinggi yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan UU perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel</li> <li>2. Menyempurnakan peraturan-peraturan operasionalnya</li> <li>3. Melakukan harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas kementerian</li> <li>4. Formulasi kebijakan dan regulasi pendanaan pendidikan tinggi</li> </ol>
3. Melakukan diversifikasi mandat dan misi perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kebutuhan daerah dan nasional atas jalur, jenis, jenjang, dan bidang ilmu pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelaraskan KKNl</li> <li>3. Merumuskan sistem alih jalur, alih jenjang</li> </ol>
4. Mendorong perguruan tinggi mencapai posisi dan peran terbaiknya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan mutu perguruan tinggi sebagai dasar untuk menentukan tingkat pengembangan saat ini dan basis perencanaan pengembangan dan penetapan mandatnya.</li> <li>2. Melakukan pemetaan kekuatan perguruan tinggi berbasis pengembangan keilmuannya sebagai dasar dari perencanaan pengembangan dan penetapan mandatnya.</li> <li>3. Menerapkan pola pengembangan, pembinaan, dan pendanaan perguruan tinggi berbasis mandatnya (peta a dan b).</li> <li>4. Membangun dan memfasilitasi pusat keunggulan nasional, regional (berbasis pulau), dan provinsi.</li> </ol>

Arah Kebijakan	Program
5. Mengembangkan sumber daya dan memfasilitasi program akademik perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendanaan yang kompetitif.</li> <li>2. Memfasilitasi pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Memfasilitasi investasi sumber daya perguruan tinggi dalam rangka mengimplementasi program strategis nasional.</li> <li>4. Memfasilitasi perguruan tinggi untuk memanfaatkan sumber daya secara bersama dalam hal fasilitas pendidikan dan penelitian, detasering, dll.</li> <li>5. Memfasilitasi interkoneksi antar perpustakaan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam upaya meningkatkan pemanfaatan bersama sumber belajar.</li> </ol>
6. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan legal framework untuk terbentuknya tata kelola PT yang sehat</li> <li>2. Memfasilitasi program-program akademis pendukung kompetensi</li> </ol>
7. Meningkatkan keselarasan hasil perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem informasi yang menjembatani supply and demand.</li> <li>2. Melakukan pemetaan kebutuhan lulusan dan produk perguruan tinggi lainnya di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.</li> <li>3. Mensinergikan dan mensinkronkan program akademik dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik Lembaga Penelitian Non Departemen (LPND), Lembaga Penelitian Departemen (LPD), berbagai Research &amp; Development unit di industri yang diharapkan akan memperkaya pengembangan pembelajaran, program penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
8. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun institusi yang menjunjung tinggi terjadinya suasana akademik di perguruan tinggi yang sehat dan mencerahkan.</li> <li>2. Mendorong kegiatan mahasiswa yang bermuara pada peningkatan kecerdasan, ketrampilan, dan karakter (kebebasan akademik, kejujuran, taat hukum, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik, berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat</li> </ol>

Arah Kebijakan	Program
	<p>luas).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong terciptanya sistem yang meritokratik dan masyarakat inklusif (agama, etnis, kultur, dll.)</li> <li>4. Mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikan yang membangun karakter</li> </ol>
9. Meningkatkan Kewirausahaan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pusat-pusat kewirausahaan di PT</li> <li>2. Capacity development</li> </ol>
10. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan aktif dalam mengembangkan sistem inovasi nasional.</li> <li>2. Memfasilitasi pengembangan IPTEKS berbasis keunggulan sumber daya lokal (alam, sosial, budaya, manusia) yang memiliki daya saing tinggi melalui pemberian insentif.</li> <li>3. Mendorong dan memfasilitasi aliansi strategis antar perguruan tinggi untuk membangun kualitas (akademik dan penelitian) pendidikan tinggi secara sinergi.</li> </ol>
11. Mengawal implementasi program strategis nasional secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat program pendidikan tinggi yang mempunyai relevansi tinggi dengan kepentingan nasional.</li> <li>2. Mendukung program pendidikan tinggi yang memiliki nilai strategis nasional namun kurang diminati oleh masyarakat luas (astronomi, pertanian, MIPA, sastra dan budaya daerah).</li> </ol>
12. Mendorong dan memfasilitasi internasionalisasi pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pertukaran mahasiswa dan dosen secara timbal balik</li> <li>2. Mendorong dan memfasilitasi internasionalisasi program studi secara bermartabat (melalui perekrutan mahasiswa asing yang berkualitas dengan skema kerja sama, proses benchmarking dengan program studi yang lebih berkualitas di luar negeri, akreditasi internasional, dan kolaborasi penelitian internasional, memfasilitasi terjadinya cross cultures, dan peningkatan profisiensi Bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya).</li> <li>3. Memperlancar pengurusan administrasi keimigrasian terkait dengan pemberian students and or staff's visas.</li> </ol>

Arah Kebijakan	Program
13. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	<p>4. Mendorong dan memfasilitasi pembukaan program pendidikan tinggi khususnya seni dan budaya di luar negeri.</p> <p>1. Mengembangkan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) sebagai basis akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.</p> <p>2. Memfasilitasi tumbuh dan berfungsinya SPMI perguruan tinggi.</p> <p>3. Memastikan keselarasan Standard Nasional Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>4. Memastikan keselarasan penggunaan instrumen BAN PT yang mengacu pada Standard Nasional Pendidikan Tinggi dalam melakukan akreditasi program dan perguruan tinggi.</p>
Strategi 2	Uraian Strategi yang Diusulkan
1. Meningkatkan aksesibilitas beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau mahasiswa dalam bidang ilmu yang strategis	<p>1. Mendorong Diknas untuk memastikan pemberdayaan calon mahasiswa yang berprestasi dari masyarakat miskin.</p> <p>2. Memastikan ketersediaan dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan UU BHP.</p> <p>3. Membangun sistem yang akuntabel dan transparan untuk mengalokasikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa secara tepat sasaran, waktu, jumlah, dan program.</p>
2. Mendayagunakan berbagai sumber daya untuk meningkatkan cakupan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan	<p>1. Memfasilitasi perguruan tinggi untuk mampu menghitung unit cost pendidikan tinggi secara nyata mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Mendorong perguruan tinggi untuk menjalankan kebijakan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang berpihak pada calon mahasiswa yang berprestasi dari masyarakat miskin.</p> <p>3. Mendorong perguruan tinggi untuk membangun sistem beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa secara tepat sasaran, waktu, jumlah, dan program.</p> <p>4. Mendorong akuntabilitas penerimaan dana beasiswa dari donatur</p>

Arah Kebijakan	Program
	<p>oleh perguruan tinggi dan membentuk dana lestari untuk keperluan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.</p> <p>5. Mendorong kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa</p>
<p>3. Memperbaiki ekuitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi ketersediaan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili.</li> <li>2. Mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi di daerah tersebut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili dengan memprioritaskan pembukaan program studi yang relevan dan lulusannya dapat diserap dengan sangat baik oleh dunia usaha di tingkat lokal.</li> <li>3. Bersama Depdagri, melakukan kajian lebih lanjut tentang peran pemerintah daerah dalam pendanaan perguruan tinggi.</li> <li>4. Mendorong dunia usaha dan masyarakat secara umum untuk berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dan daerah yang kurang terwakili.</li> </ol>
<p>4. Optimasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekspansi akses oleh PTS hanya boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas program akademik yang diselenggarakan (akreditasi A/B) atau dengan pembinaan oleh PTN/PTS/BHMN/BHP/BHPM yang berkualitas.</li> <li>2. Right sizing PTS melalui proses penggabungan (merger)</li> <li>3. Memfasilitasi PTS untuk memprioritaskan pembukaan program studi yang lulusannya dapat diserap dengan sangat baik oleh dunia usaha di tingkat lokal.</li> </ol>
<p>5. Meningkatkan peran masyarakat terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan kesetaraan</p>	<p>Mendorong dan memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat secara umum untuk berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dengan memprioritaskan pembukaan program studi yang lulusannya dapat diserap dengan sangat baik oleh dunia usaha yang bersangkutan.</p>

Arah Kebijakan	Program
<p>6. Meningkatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan jarak jauh terkait dengan perluasan akses yang berkualitas, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan pendidikan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta jalan pengembangan pendidikan jarak jauh terutama untuk in-service training, continuing education,</li> <li>2. Mendorong UT untuk meningkatkan kualitas lulusan.</li> <li>3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.</li> </ol>
Strategi 3	Uraian Strategi yang Diusulkan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentransformasi struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam konteks otonomi PT.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan level otonomi perguruan tinggi terkait dengan implementasi UU Sisdiknas dan UU otonomi PT.</li> <li>2. Menyelaraskan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan direktorat dan unit-unit kerja dan fungsional yang ada dengan berlandaskan prinsip efektivitas dan efisiensi.</li> <li>3. Mengembangkan system pendanaan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</li> <li>4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan tinggi.</li> <li>5. Meningkatkan kemampuan SDM dan sistem pengelolaan Ditjen DIKTI.</li> <li>6. Meningkatkan koordinasi intensif dan sinergi antar dan inter kementerian maupun internal Ditjen DIKTI.</li> <li>7. Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk informasi publik dan pengelolaan pendidikan tinggi.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong pembangunan sistem kelembagaan mandiri</li> <li>3. Membina dan menyehatkan perguruan tinggi badan hukum pendidikan</li> <li>4. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan blue print/road map untuk mendorong terbangunnya kemandirian lembaga-lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi</li> <li>2. Melakukan inisiasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga-lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau asosiasi profesi agar mandiri dalam sistem</li> </ol>



Arah Kebijakan	Program
	<p>pengambilan keputusannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan koordinasi intensif dengan Depnaker, Deperindag, Deperin, MenPan dalam meningkatkan keterserapan lulusan dan produk pendidikan tinggi oleh kementerian lain, pemerintah daerah, maupun masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi asosiasi profesi agar lebih bereperan aktif dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.</li> <li>5. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui proses kontrol yang aktif.</li> <li>6. Memfasilitasi transformasi perguruan tinggi menjadi BHP</li> <li>7. Mengembangkan jaringan pembinaan klaster perguruan tinggi dan bidang ilmu.</li> </ol>
Strategi 4	Uraian Strategi yang Diusulkan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama instansi terkait, mendorong kebijakan tax exemption (pengecualian pajak) dan tax deduction (pengurangan pajak) bagi donatur untuk mengembangkan akses dan kualitas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Mendorong masyarakat untuk mencintai produk pendidikan dan riset dalam negeri</li> <li>3. Mendorong dunia usaha untuk membangun university based industrial R&amp;D.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat (ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan) dan pencapaian MDGs</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kekuatan moral perguruan tinggi dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.</li> <li>2. Mendorong adanya kebijakan bahwa TRIDHARMA bersifat institusional; dan bukan individual termasuk dalam sistem sanksi dan penghargaan kepada dosen.</li> <li>3. Mendorong adanya kebijakan agar perguruan tinggi tidak menjadi</li> </ol>

Arah Kebijakan	Program
	<p>menara gading.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mendorong perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara institusional dalam jangka panjang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, keunikan, dan keunggulan lokal.</li> <li>5. Memfasilitasi program akademik yang bermuara pada pencapaian MDGs.</li> <li>6. Mendorong perguruan tinggi untuk mengalirkan informasi hasil-hasil pendidikan dan riset kepada masyarakat.</li> <li>7. Mendorong perguruan tinggi untuk membuka klinik aplikasi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara mudah dan murah.</li> <li>8. Mendorong perguruan tinggi untuk membangun dan memfungsikan pusat inkubator bisnis.</li> </ol>

## LAMPIRAN 3 : TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KEGIATAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IKU/IKK	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					
				2010	2011	2012	2013	2014	
4	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	IKU 4.1	APK PT DAN PTA USIA 19-23 THN *)	21,6%	22,8%	25,1%	26,7%	28,6%	30,0%
		IKU 4.2	RASIO KESETARAAN GENDER PT	116,7%	111,8%	107,9%	104,6%	104,5%	104,0%
		IKU 4.3	JUMLAH PT PK BLU/BLU ( BHP )	0	20	27	35	45	60
		IKU 4.4	JUMLAH PT BEROPINI WTP DARI KAP	6	11	20	22	26	30
		IKU 4.5	PERSENTASE PRODI TERAKREDITASI	73,0%	56,8%	62,7%	69,0%	75,0%	81,0%
		IKU 4.6	PERSENTASE PRODI PT BERAKREDITASI MINIMAL B	64,8%	49,6%	50,0%	51,0%	52,0%	53,0%
		IKU 4.7	JUMLAH PERGURUAN TINGGI MASUK TOP 500 DUNIA	3	3	5	6	8	11
		IKU 4.8	RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S-1	17,2%	19,0%	21,0%	24,0%	27,0%	30,0%
		IKU 4.9	APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI (USIA 19-23 TAHUN)	3,6%	4,1%	5,0%	6,0%	8,0%	10,0%
		IKU 4.10	PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI MINIMAL S2	61,5%	65,0%	70,0%	75,0%	85,0%	90,0%
		IKU 4.11	PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S-3	10,10%	12,5%	13,5%	16,0%	19,0%	21,5%
		IKU 4.12	PERSENTASE DOSEN BERSERTIFIKAT	16,0%	23,5%	37,5%	50,0%	62,5%	75,0%
		IKU 4.13	PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL	4,2%	5,0%	5,2%	5,4%	5,5%	5,7%
		IKU 4.14	PERSENTASE DOSEN DENGAN PUBLIKASI INTERNASIONAL	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%
		IKU 4.15	JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN	65	75	95	110	130	150
		IKU 4.16	PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA	6,0%	9,4%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IKU/IKK	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					
				2010	2011	2012	2013	2014	
4.1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	IKK 4.1.1	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN	-	6	6	6	6	6
		IKK 4.1.2	PROSENTASE DIPASATKER DITJEN DIKTI DIREVISI TINGKAT PUSAT	-	57%	50%	35%	25%	15%
		IKK 4.1.3	PROSENTASE USULAN BLU PTN DARI DIKTI DITETAPKAN KEMENKEU KURANG DARI 6 BULAN	-	-	80%	85%	90%	95%
		IKK 4.1.4	PERSENTASE ANGGARAN DI BLOKIR PADA DIPASATKER TAHUN BERJALAN	-	2,3%	2,0%	1,5%	1,0%	0,5%
		IKK 4.1.5	PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97,0%	99,0%	100%	100%	100%	100%
		IKK 4.1.6	PROSENTASE LAPORAN AKUNTANSI MANUAL SATKER SESUAI SAI	85,0%	87,0%	90,0%	92,0%	95,0%	97,0%
		IKK 4.1.7	JUMLAH SATKER BLU MENERAPKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK DAN SAP	6	14	25	27	32	37
		IKK 4.1.8	PROSENTASE TEMUAN HASIL AUDIT BPK DAPAT DISELESAIKAN KURANG DARI 6 BULAN	-	77%	85%	89%	92%	95%
		IKK 4.1.9	PROSENTASE PERSETUJUAN TUP SATKER SEKRETARIAT 100%	-	80%	85%	90%	95%	100%
		IKK 4.1.10	RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237
		IKK 4.1.11	JUMLAH LAPORAN BMN SATKER SESUAI SIMAK BMN	91	95	95	95	95	95
		IKK 4.1.12	JUMLAH LAYANAN DI BAGIAN MENERAPKAN E-LAYANAN	1	1	1	4	8	12
		IKK 4.1.13	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBJ	0%	0,05%	0,18%	0,35%	0,55%	0,75%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
					2010	2011	2012	2013	2014
		IKK 4.1.14	JUMLAH PT TERGABUNG DALAM INHERENT (GDLN )	363	390	418	445	473	500
		IKK 4.1.15	PERSENTASE SATKER BERDAYA-SERAP > 95%	46,3%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%
		IKK 4.1.16	JUMLAH INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI YANG SUDAH DIPUBLIKASIKAN	-	-	25	30	35	35
		IKK 4.1.17	JUMLAH PAMERAN PENDIDIKAN TINGGI	-	-	2	3	3	4
<b>4.2</b>	<b>LAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI</b>	IKK 4.2.1	JUMLAH SATKER PENERIMA DANA MASYARAKAT	83	83	88	93	98	103
<b>4.3</b>	<b>PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI</b>	IKK 4.3.1	JUMLAH PT PENERIMA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS INSTITISI	59	59	59	59		
<b>4.4</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI MAHASISWA</b>	IKK 4.4.1	PERSENTASE MAHASISWA PTP PENERIMA BEASISWA PEMERINTAH	3,7%	6,2%	9,4%	13,8%	13,8%	13,8%
		IKK 4.4.2	PERSENTASE MAHASISWA PTM PENERIMA BEASISWA PEMERINTAH	1,9%	3,1%	4,6%	6,2%	6,2%	6,2%
		IKK 4.4.3	PERSENTASE MAHASISWA MENERIMA BEASISWA DUNIA USAHA DAN DONOR LAINNYA (CSR)	0,4%	0,7%	1,0%	1,4%	1,4%	1,4%
		IKK 4.4.4	JUMLAH MAHASISWA PERAIH MEDALI DALAM OLIMPIADE SAINS YANG MENERIMA BEASISWA	57	60	62	65	68	70
		IKK 4.4.5	JUMLAH PUSAT KEWIRAUSAHAAN DAN PRODUKTIVITAS	70	110	150	200	260	330
		IKK 4.4.6	PERTAMBAHAN JUMLAH MAHASISWA BARU HASIL PERUBAHAN MODEL PEMBELAJARAN	N.A	N.A	55.000	60.000	65.000	70.000
		IKK 4.4.7	JUMLAH PRODI YANG MENERAPKAN PENJAMINAN MUTU PEMBELAJARAN	1.914	4.200	6.800	8.300	10.200	12.000
		IKK 4.4.8	WAKTU TUNGGU MENDAPATKAN KESEMPATAN BERKARYA PERTAMA	12	11	10	9	8	6

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IKU/IKK		KONDISI AWAL (2009)	TARGET				
					2010	2011	2012	2013	2014
			(BULAN)						
4.5	PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK	IKK 4.5.1	PRODI VOKASI YANG TERAKREDITASI MINIMAL B	62,7%	66,7%	71,7%	76,7%	82,7%	90%
4.6	PENINGKATAN MUTU PRODI PROFESI KESEHATAN DAN MUTU PENDIDIKAN KESEHATAN	IKK 4.6.1	PRODI PROFESI KESEHATAN YANG TERAKREDITASI	0%	0%	25%	31,5%	48,5%	66,5%
		IKK 4.6.2	JUMLAH PT MEMENUHI STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA	126	153	183	213	243	273
4.7	PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU	IKK 4.7.1	PERSENTASE DOSEN PTN YANG BERKUALIFIKASI S2	73,8%	78,5%	82,5%	88,5%	94,5%	100,0%
		IKK 4.7.2	PERSENTASE DOSEN PTS YANG BERKUALIFIKASI S2	46,7%	51,7%	57,0%	65,0%	75,0%	90,0%
		IKK 4.7.3	PERSENTASE DOSEN PTN YANG BERKUALIFIKASI S3	16,1%	17,5%	20,0%	23,5%	26,5%	30,0%
		IKK 4.7.4	PERSENTASE DOSEN PTS YANG BERKUALIFIKASI S3	4,0%	4,3%	4,7%	5,2%	5,6%	6,0%
		IKK 4.7.5	PERSENTASE DOSEN PTN BERSERTIFIKAT	26,8%	39,0%	50,0%	65,0%	80,0%	100,0%
		IKK 4.7.6	PERSENTASE DOSEN PTS BERSERTIFIKAT	7,4%	10,5%	26,0%	37,0%	49,0%	55,5%
		IKK 4.7.7	PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN PTN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT FUNGSIONAL	0%	1,9%	3,7%	5,5%	7,5%	10,0%
		IKK 4.7.8	JUMLAH DOSEN YANG MENGIKUTI PELATIHAN AKADEMIK DI LUAR NEGERI	700	750	800	850	900	1000
		IKK 4.7.9	JUMLAH DOSEN YANG MENGIKUTI PELATIHAN AKADEMIK DI DALAM NEGERI	150	200	250	300	350	400
		IKK 4.7.10	JUMLAH PT PENYELENGGARA SERTIFIKASI DOSEN	60	65	70	75	80	85
		IKK 4.7.11	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN, KINERJA DAN KEPEGAWAIAN	3	3	3	3	3	3
4.8	PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	IKK 4.8.1	PERSENTASE PTN MENUJU OTONOMI PT	8%	15%	17,5%	24%	27,5%	30%
		IKK 4.8.2	JUMLAH PENDIRIAN/PERUBAHAN PTN DAN PTS BARU	45	55	65	75	85	95
		IKK 4.8.3	JUMLAH PENUTUPAN PTS	1	1	2	4	6	8

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IKU/IKK	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					
				2010	2011	2012	2013	2014	
		IKK 4.8.4	JUMLAH PEMBUKAAN PRODI BARU	500	500	500	500	500	500
		IKK 4.8.5	JUMLAH MAHASISWA ASING DI PTI	5.280	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
		IKK 4.8.6	JUMLAH KERJASAMA KELEMBAGAAN	2.088	2.100	2.150	2.175	2.200	2.225
		IKK 4.8.7	JUMLAH KANTOR URUSAN INTERNASIONAL DI PERGURUAN TINGGI	33	33	50	60	70	80
4.9	PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	IKK 4.9.1	JUMLAH DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN	44.460	16.701	9.063	13.656	18.249	22.842
		IKK 4.9.2	JUMLAH DOSEN DENGAN PUBLIKASI NASIONAL	6.733	8.193	8.742	9.280	9.790	10.310
		IKK 4.9.3	JUMLAH DOSEN DENGAN PUBLIKASI INTERNASIONAL	484	593	643	693	743	793
		IKK 4.9.4	JUMLAH HAKI YANG DIDAFTARKAN	65	721	871	1.021	1.171	1.321
		IKK 4.9.5	PERSENTASE PT YANG MEMBERIKAN AKSES INTERNET DAN E-JOURNAL	50%	52%	54%	56%	58%	60%
		IKK 4.9.6	JUMLAH DOSEN YANG MELAKUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	6.286	3.594	3.610	3.750	4.000	4.245
		IKK 4.9.7	JUMLAH PT YANG MEMPUNYAI INKUBATOR BISNIS/INDUSTRI	11	15	18	20	23	25
		IKK 4.9.8	PERSENTASE PT YANG MEMPUNYAI KERJASAMA DENGAN INDUSTRI BERBASIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%
		IKK 4.9.9	PERSENTASE PT YANG MEMPUNYAI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS PENELITIAN DAN KEBIJAKAN	0,5%	1%	2%	4%	6%	8%
		IKK 4.9.10	JUMLAH MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA	13.780	14.763	16.959	18.662	20.348	22.084
		IKK 4.9.11	JUMLAH DOSEN YANG MENULIS BUKU AJAR PERGURUAN TINGGI	63	290	325	360	395	430